BAHASA DAN SASTRA DAERAH SEBAGAI PILAR PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Afendy Widayat, M. Phil.
FBS UNY

1. Pendahuluan

Kata kebudayaan secara etimologis berasal dari kata 'budi' dan 'daya' menjadi 'budaya' yang pada proses morfologisnya mendapat afiksasi {ke-an}. Kata 'budi' dapat berarti 'pikiran' atau 'olah pikir', sedang kata 'daya' dapat berarti 'kekuatan' atau 'kemampuan'. Dengan demikian 'bidaya' dapat berarti 'kekuatan olah pikir', lalu 'kebudayaan' dapat berarti 'segala sesuatu yang merupakan hasil kekuatan olah pikir'. Suatu pendapat yang hampir sama, seperti Kontjaraningrat menyatakan bahwa kata 'budaya' berasal dari bahasa Sansekerta, yakni dari kata 'buddhayah' yang merupakan bentuk jamak dari kata 'buddhi' yang bermakna 'akal-budi'. Jadi, kebudayaan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai hasil akal budi, yang hingga saat ini terbukti terutama hanya dimiliki makhluk manusia.

Sehubungan dengan pengertian kebudayaan, dalam buku " Primitive Culture" karangan E.B. Taylor yang pertama kali terbit tahun 1871, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Suriasumantri, 1996: 261) . Kemudian Kuntjaraningrat (1974: 12) berpendapat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang terdiri atas sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sietem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Dalam hal ini, kebudayaan merupakan garis pemisah antara manusia dan binatang. Kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan oleh manusia untuk menginterpretasi pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial (Spradley, 1997: 5). Dalam prosesnya kebudayaan dapat berfungsi menyebarkan nilai-nilai dari satu generasi ke

generasi berikutnya. Oleh karena itu, manusialah yang harus membentuk kebudayaan, namun sebaliknya, kebudayaan juga dapat membentuk manusia.

Suatu kebudayaan secara umum akan mengalami perubahan-perubahan baik yang dianggap sebagai perkembangan maupun sebagai kemerosotan (degradasi). Dalam sejarah peradaban manusia telah tercatat bahwa suatu kebudayaan dapat bertahan dan berlangsung hingga waktu yang relatif lama, sementara kebudayaan lainnya hanya dapat bertahan hingga waktu yang relatif singkat. Teori fungsional menyatakan bahwa suatu kebudayaan hanya dapat bertahan secara survifal apabila kebudayaan tersebut masih fungsional dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Dari sisi yang lain, dinyatakan bahwa suatu kebudayaan akan tetap bertahan bila suatu masyarakat atau bangsa yang menjadi pendukungnya merupakan bangsa yang lebih berkemampuan menguasai bangsa lainnya. Teori lainnya lagi menyatakan bahwa suatu kebudayaan akan dapat bertahan bila kebudayaan yang bersangkutan dinilai lebih modern, yakni lebih praktis, lebih efektif dan efisien diterapkan dalam kehidupan manusia.

Berbagai teori yang ada sesungguhnya masih memunculkan suatu permasalahan, yakni apa yang menjadi sarana dan prasarana sebagai wahana kehidupan kebudayaan itu? Terlepas dari berbagai teori di atas, bagaimanapun juga kebudayaan hanya dapat hidup dan ditularkan melalui bahasa dan pada gilirannya juga melalui sastranya. Disadari ataupun tidak, dalam setiap kontak kebahasaan, terkandung suatu transfer kebudayaan secara luas, baik bersifat sepihak atau saling mempengaruhi. Serpihan-serpuhan kebudayaan akan selalu "hadir dan ditawarkan" sebagai suatu kemungkinan untuk diberlangsungkan. Dengan demikian akan tertjadi bargaining baik secara sengaja atau disadari ataupun secara halus (hegemoni).

2. Kebudayaan Harus "Disadari"

Kebudayaan, semula lebih bersifat sesuatu yang kebendaan. Peursen (1988: 10), mencatat bahwa dari dulu hingga sebagian masyarakat sekarang, menganggap kebudayaan meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan bersifat rohani. Hal ini yang sering memunculkan pendapat tentang perbedaan antara "bangsa bangsa berbudaya" (yang dianggap

lebih beradab, lebih tinggi) dan "bangsa-bangsa alam" (yang dianggap lebih primitive). Kenyatan itu memang tidak dapat diabaikan, namun demikian dalam rangka manusia yang selalu berusaha lebih memanusia, maka setiap kebudayaan harus disadari sebagai suatu kemungkinan. Hal seperti ini yang sering dimaknai sebagai strategi kebudayaan.

Pada kenyataannya, setiap kelompok masyarakat yang menelorkan kebudayaannya masing-masing secara umum akan mempertahankan kebudayaannya mulai dari bentuknya apalagi isi nilainya. Mereka selalu merasa kebudayaan yang mereka milikilah yang paling representative bahkan paling benar. Manakala terjadi kontak antar-budaya, seringkali yang disodorkan adalah sekedar filter-filter untruk menyaring serpihan mana dari kebudayaan asing itu dapat dan boleh diterima atau tidak. Di sisi lain sifat kodrati manusia yang "selalu ingin tahu", juga akan menggoda setiap anggota masyarakat yang bersangkutan untuk mencoba menerima bentuk kebudayaan baru yang ia dapatkan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri akan selalu terjadi ketegangan antara idealisme kebudayaan kelompok pendukungnya dengan pembaharuan kebudayaan melalui personalitas anggotanya. Pada dewasa ini kenmyataan itu semakin terlihat jelas, karena era globalisasi lebih menawarkan kontak budaya secara lebih terbuka dan lebih mudah diakses. Era globalisasi seakan mengeliminir sekat-sekat budaya dan cenderung menyeret ke arah penyatuan, dalam hal ini penyatuan budaya.

Ditinjau dari sisi kemajuan ke arah manusia yang lebih manusiawi,, yang menjadi permasalahan adalah justru penyatuan yang bersifat terbuka itu juga terbuka bagi segala kemungkinan, termasuk degradasi nilai. Meskipun acuan kebaikan nilai ini pun dapat berbeda, namun secara umum, tentu saja, setiap manusia dapat menerima nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Bila pernyataan ini dapat diterima, maka kebudayaan memang harus disadari, dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik, namun sekaligus tidak memaksakan perubahan secara cepat pada bentuk-bentuk baru. Setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang sama dalam mempertahankan bentuk dan nilai-nilai kebudayaannya, sekaligus juga harus menyadari perlunya strategi ke arah kemajuan yang lebih baik.

Menurut Peursen (1988: 11), pada saat terakhir ini, kebudayaan harus tidak sekedar dimaknai sebagai suatu kebendaan, tetapi harus lebih dari itu, yakni sebagai "kata kerja". Konsep kebudayaan harus diperluas dan didinamisir. Kebudayaan yang merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, selalu dapat berubah. Manusialah yang

membuat sesuatu tentang tradisi itu, manusia pula yang menerima atau menolaknya, atau merubahnya. Dengan demikian kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan tidak sekedar hasil warisan yang ditakdirkan tetapi harus sungguh-sungguh dipikirkan, ditangani, dikelola dan diperalat, sehingga dinamikanya lebih dapat terarah.

Hal yang hampir sama, khususnya dalam hal perubahan sosial, Appell (dalam Dove, 1985: 319-321), juga menuliskan bahwa hal yang paling mendesak adalah pengelolaan perubahan itu sendiri. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa perubahan itu juga diikuti oleh perusakan; bahkan yang disebut dengan pembangunan pun juga sering diikuti oleh perusakan-perusakan baik disadari maupun tidak. Menurutnya, terdapat tujuh prinsip dalam perubahan sosial, yakni sebagai berikut.

(1) Setiap kegiatan pembangunan atau modernisasi pasti melibatkan kegiatan perusakan
(2) Upaya memperkenalkan suatu aktivitas baru, senantiasa menggeser suatu aktivitas tradisional
(3) Potensi dari suatu populasi amat terbatas, dan setiap tindakan perubahan sementara mengurangi potensi tersebut, sampai perubahan yang bersangkutan telah seluruhnya diterima.
(4) Mengingat pengurangan potensi adaptasi seperti tersebut di atas, setiap tindakan perubahan dapat menimbulkan kerugian fisiologis, psikologis, dan atau perilaku dalam poipulasi yang bersangkutan
(5) Modernisasi menggerogoti mekanisme penunjang dan perawatan dalam mengelola tekanan sosial,
(6) Perubahan selalu menimbulkan kerugian psikologis maupun kompensasi bagi kerugian tersebut.
(7) Perubahan mengancam keadaan (gizi) suatu populasi.

Setiap poin-poin tersebut dijelaskan dan diuraikan sedemikian rupa dengan berbagai bukti yang didapatkannya. Dengan demikian, tampak benar suara pesimisme yang dikemukakan itu. Namun demikian, yang jelas harus diperhatikan ialah bahwa perubahan itu sendiri tidak dapat ditolak. Hingga saat ini perubahan demi perubahan selalu saja harus dan harus diterima. Semakin maju penerimaan perubahan ke dalam dunia pengetahuan, ke dalam majunya dunia

informasi dan sebagainya, semakin jauh pula bola globalisasi akan menggulirkannya. Demikian nyata keadaan ini hingga kebudayaan-kebudayaan yang semula dianggap sebagai adab yang besar, seperti komunisme di Unisovyet, akhirnya harus tumbang oleh perubahan, meskipun perubahan itu telah melalui proses yang sedemikian rumit. Akhir-akhir ini dapat disimak melalui berbagai media tentang perubahan-perubahan mendasar di Negara-negara Timur-Tengah untuk menyuarakan budaya demokrasi, dan mereka juga harus membayar mahal berbentuk perusakan-perusakan hasil budaya yang selama ini diagungkan.

Kembali pada pembicaraan ini, bahwa dengan demikian hal yang harus tetap dilakukan adalah bahwa perubahan demi perubahan harus disadari, dimengerti untuk disiasati sebagai suatu strategi. Dalam hubungannya dengan kebudayan-kebudayaan daerah, mesti harus disadari bahwa pada kenyataannya selalu terjadi bargaining dalam perubahan menuju pada "kemajuan". Oleh karena itu, "kemajuan" yang diharapkan adalah kemajuan yang berorientasi pada suatu nilai kebenaran universal yang seharusnya juga "dimiliki" oleh nilai-nilai dari kebudayaan-kewbudayaan daerah yang, ditinjau dari berbagai segi, memang layak untuk dipertimbangkan sebagai suatu kemungkinan dalam konteks universalitas tersebut.

3. Wayang Purwa Jawa: Salah Satu Hasil Kebudayaan Daerah

Yang dimaksud dengan kebudayaan daerah dalam hal ini adalah kebudayaan dari suatu daerah yang merupakan bagian dari suatu negara, dan dihayati oleh masyarakat pendukungnya hingga saat ini. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu kebudayaan daerah, yakni kebudayaan daerah di suatu bagian kecil di Indonesia, yakni kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa Jawa (Jawa bukan ras khusus), yakni suku bangsa yang mendiami sebagian wilayah di Pulau Jawa. Secara geografis-politis, pada umumnya, suku Jawa mendiami wilayah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Propinsi Jawa Timur. Salah satu cirri pengenal utamanya, yakni penggunaan bahasa yang disebut bahasa Jawa. Meskipun di sana terdapat beberapa ragam dialek bahasa Jawa, namun cirri-ciri pengenalnya sebagai bahasa Jawa tetap melekat di dalam bahasa tersebut.

Dari sisi kebahasaannya, setidaknya Jawa telah melalui tiga kebahasaan, yakni bahasa Jawa Kuna, bahasa Jawa Pertengahan, dan bahasa Jawa Baru sekarang ini. Menurut bukti yang

ditemukan, bahasa Jawa Kuna setidaknya telah dipergunakan pada 25 Maret tahun 804, yakni dalam Prasasti Sukabumi (Zoetmulder, 1984: 3). Menurut Poerbatjaraka (1964: 68), penggunaan bahasa Jawa Kuna dalam kehidupan sehari-hari hanya sampai pada waktu sebelum berdirinya kerajaan Singasari (abad ke-12). Setelah itu, orang sudah menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Pada jaman Majapahit (abad ke-14), bahasa Jawa Pertengahan sudah menjadi bahasa sehari-hari dan bahasa umum. Namun demikian dalam bahasa sastra, para pujangga Majapahit masih menggunakan bahasa Jawa Kuna, seperti dalam *Nagarakretagama, Arjunawijaya*, dan sebagainya, bahkan tradisi penulisan sastra dengan bahasa Jawa Kuna masih dapat ditemukan di Bali pada jaman modern ini. Bahasa Jawa Baru, diperkirakan telah dimulai pada abad ke-16, dengan ciri-ciri yang mendapat banyak pengaruh dari kosa kata bahasa Arab. Dengan demikian, dari sisi bahasanya, tampak bahwa budaya Jawa telah lama berakar dan berkembang, atau dengan kata lain kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang telah berusia tua. Dengan demikian tidak berlebihan bila, berbagai hasil kebudayaan, baik yang berupa kebudayaan fisik (artefak), sistem sosial, maupun sistem ide, baik yang bersifat tangibel maupun intangibel, hingga saat ini masih eksis dipertahankan oleh masyarakat Jawa. Sebagian hasil kebudayaan tersebut diakui eksistensinya di tingkat nasional bahkan internasional. Budaya keris, batik, dan wayang kulit purwa telah mendapatkan pengakuan dari Unesco (PBB) sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tanggal 7 Nopember tahun 2003, misalnya, Unesco mengakui bahwa wayang purwa termasuk dalam aset budaya dunia. Dari idealisme Jawa sendiri, hasil-hasil budaya tersebut dianggap sebagai budaya yang ”adi-luhung”, yakni yang indah dan bernilai tinggi. Dengan kata lain wayang kulit diakui sebagai budaya yang memang *adiluhung* sehingga perlu dilestarikan eksistensinya. Dengan demikian dari satu sisi, wayang purwa mulai berperanan dalam budaya global.

Secara umum telah diketahui bahwa cerita atau lakon-lakon yang berkembang dalam wayang purwa di Jawa, bersumber pada cerita dari India, yakni kisah *Ramayana* dan *Mahabharata.* Di Jawa, cerita-cerita dari India tersebut telah diolah sedemikian rupa, sehingga seringkali telah jauh dari aslinya. Tokoh Drupadi yang, di India, diceritakan sebagai wanita yang berpoliandri dengan para Pandawa berlima, di Jawa Drupadi hanyalah sebagai isteri Yudhistira. Dengan demikian konsekwensi alur dan kisah cerita ke belakang juga harus menyesuaikan. Pancawala, yang semula berarti ‘kelima anak para Pandawa’, di Jawa Pancawala adalah nama tokoh, yakni putera Drupadi dengan Yudhistira. Kisah perginya Arjuna ke hutan, yang di India

dikarenakan alasan memergoki atau dianggap merecoki hubungan Drupadi dengan Pandawa lainnya, di Jawa alasan itu tidak ditampakkan lagi, meskipun muncul cerita Arjuna Wiwaha yang juga berlatar kepergian Arjuna ke hutan.

Dalam *Adiparwa* di India, hubungan Kunti dan Madri dengan para dewa sehingga beranakkan para Pandawa itu dilatar-belakangi oleh cerita tentang Pandu yang memanah kijang sejoli yang sedang bercengkerama, yang ternyata adalah seorang resi, yakni Resi Kindama. Resi Kindama mengutuk Pandu bahwa Pandu akan mati ketika sedang bercengkerama dengan isterinya. Oleh karena itu Kunti menghubungi para dewa dengan ilmu Adityahrdaya hingga berputera Yudhistira, Bima dan Arjuna. Lalu Madri diajari ilmu itu untuk menghubungi dewa sehingga berputera kembar yakni Sahadewa dan Nakula. Dalam wayang purwa latar cerita tersebut tidak sangat ditekankan, sehingga "kenakalan" Kunti dan Madri sering kali dianggap sebagai makna batiniah bukan makna biologis semata. Dengan kata lain, hubungan Kunti dan Madri dengan para dewa sehingga melahirkan Karna dan Para Pandawa, di Jawa tidak sangat dipermasalahkan. Secara umum Pandawa dianggap sebagai anak biologis dari Kunti dan Pandu. Tidak mustahil bila pertemuan Pandu dengan Resi Kindama tidak populer di Jawa.

Masih banyak lagi cerita-cerita dalam wayang purwa yang tidak sangat setia mengambil cerita dari cerita asli dari India, bahkan di Jawa muncul banyak cerita baru yang sering disebut sebagai cerita "carangan". Meskipun induknya adalah cerita dari *Mahabharata* dan sedikit dari *Ramayana,* cerita "carangan" berisi cerita tersendiri yang tidak akan ditemui di India, kecuali struktur keluarga para tokohnya saja. Dalam wayang purwa juga muncul tokoh-tokoh Panakawan (abdi pamong), yakni Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, yang juga tidak ditemukan di India. Terutama tokoh Semar, di Jawa berkedudukan sebagai tokoh yang sangat istimewa, baik karena wataknya, eksistensi pengabdiannya, kesaktiannya, maupun dalam rangka kepercayaan masyarakat Jawa pada tokoh ini.

Cerita dari India tersebut di atas, di Jawa kemudian dikembangkan dalam kemasan pertunjukan wayang kulit yang saat ini dikenal dengan nama wayang purwa. Sri Mulyono (1978: 8-9) mencatat pendapat-pendapat para peneliti wayang, antara lain Crawfurt, Hageman, Poensen, Vert, Niewmann dan Brandes, bahwa pertunjukan wayang purwa yang merupakan pertunjukan dengan menekankan adanya bayang-bayang, sehingga disebut wayang (bayang) tersebut, merupakan pertunjukan asli Indonesia. Hazeu memberikan bukti-bukti bahwa istilah-istilah

sarana pertunjukan wayang kulit, yaitu: *kelir, blencong,kepyak, dalang, kothak*, dan *cempala*, merupakan istilah yang hanya terdapat di Jawa atau bahasa asli Jawa. Brandes juga menyatakan bahwa hampir seluruh istilah teknis dalam wayang adalah khas Jawa, bukan Sansekerta, dan orang Hindu memiliki teater yang sama sekali berbeda dengan wayang Jawa.

Mendasarkan pada berbagai cerita wayang purwa di Jawa tersebut, tampak bahwa akulturasi yang terjadi telah disesuaikan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang berlaku di Jawa, misalnya nilai poliandri (Drupadi) yang tidak diakui di Jawa lalu dihapuskan, nilai cikal bakal yang baik (Pandu) akan menghasilkan keturunan yang baik (Pandawa), nilai-nilai pengabdian yang ikhlas (Semar) dimunculkan, dan sebagainnya. Bahkan, kemasan ceritanya juga disuguhkan dalam bentu pepertunjukan bayang-bayang yang merupakan seni pertunjukan asli Jawa, sehingga jelas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang bernuansa Jawa. Yang menjadi pertanyaan, apakah nilai-nilai Jawa tersebut merupakan nilai yang sifatnya sangat khas Jawa ataukah sebagian juga merupakan nilai kebaikan yang bersifat universal? Pertanyaan ini yang tentu saja juga menjadi salah satu kriteria penilaian Unesco dalam menentukan wayang purwa Jawa sebagai aset warisan budaya dunia.

Sebagian nilai-nilai wayang purwa merupakan nilai-nilai kebaikan yang dapat bersifat universal. Hal ini pernah diteliti, antara lain oleh Sri Mulyono, Soetrisno, dan Hazim Amir. Menurut H.Boediardjo (dalam Amir, 1991: 9), Dr. Hazim Amir, M.A. yang berangkat dari alam pikiran Barat dalam melakukan pengamatan dan pendalamannya, menemukan pentas wayang kulit (purwa) yang tumbuh berkembang di Indonesia (Jawa) sebagai sumber berbagai macam nilai budaya, khususnya yang menyentuh etika bermasyarakat. Dalam desertasi itu merangkum nilai-nilai wayang purwa, yang digolongkan dalam tata nilai ultimum yakni "kesempurnaan sejati", yang berjumlah 20 nilai, Amir (1991: 14), menyatakan bahwa wayang purwa menawarkan nilai yang jauh lebih luas dari pada teater Barat. Dinyatakan bahwa "sesuatu" itu ialah konsep yang menyeluruh tentang manusia, tentang hidup, dan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Dengan kata lain wayang (purwa) menawarkan ajaran-ajaran filosofis yang pada dasarnya bersumber pada ajaran-ajaran religius.

Wayang purwa, semestinya harus lebih diperhatikan lagi agar kelestarian dan tumbuh kembangnya dapat lebih terarah dan tersistem untuk menuju idealisme budaya global. Bila hal ini dapat terwujud, pada gilirannya, diharapkan berbagai nilai yang ditawarkan oleh wayang

purwa, yang notabene merupakan hasil kebudayaan daerah, pada akhirnya dapat dimiliki dan dihayati (*kasalira*) oleh masyarakat global. Dari sisi bentuknya, sesungguhnya wayang purwa memang telah mendunia, hal ini misalnya pernah dicatat oleh Sri Mulyono (1978: 260). Dinyatakan bahwa pada tahun 1958, Prof. Dr. Mantle Hoot maha guru ahli musik dari Amerika telah belajar gamelan dan kemudian telah mengajarkan dan menyebar-luaskannya di Amerika. Tahun 1964 telah banyak mahasiswa dari Amerika yang belajar karawitan dan wayang. Prof. Dr. Anton L. Becker, ahli bahasa di Universitas Michigan Amerika, pada tahun 1969 telah belajar mendalang selama dua tahun kepada Sujati Jatikusuma di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1973 hasil belajarnya telah dipentaskannya di Universitas Michigan, yakni dengan niaga (penabuh gamelan) serta pesinden yang juga dari Amerika. Ki Wasitadipura dari RRI Yogyakarta juga pernah dihadirkan ke Universitas Berkeley San Francisco untuk mengajar karawitan selama dua tahun. Tentu saja semua itu dapat menjadi dasar pijak untuk lebih maju dan berkembangnya karawitan dan wayang (purwa). Meskipun baru dari sisi bentuknya, namun sangat dimungkinkan ruhnya, termasuk nilai-nilai etis dan filosofisnya juga akan mengikuti sebagai dasar pijakannya.

4. Bahasa Daerah sebagai Pilar Pelestarian dan Pengembanagn Kebudayaan

Apa yang dimiliki oleh suku bangsa Jawa tersebut boleh jadi juga dapat berlaku pada suku-suku bangsa lain yang dalam tataran tertentu dianggap sebagai kebudayaan daerah. Setiap kebudayaan sering kali menawarkan nilai-nilai yang sebagiannya merupakan nilai universal yang dapat diterima oleh setiap kelompok masyarakat. Hanya saja, tidak setiap budaya yang bersangkutan mampu menyuguhkan bentuk-bentuknya yang secara umum dapat dipandang indah. Meskipun dari sisi masyarakat pendukung budaya tersebut tidak pernah diragukan, namun hal seperti ini tentu akan menjadikan permasalahan tersendiri bagi kebudayaan yang bersangkutan, manakala terjadi pertemuan antar-budaya. Permasalahan yang mendasar sebenarnya terletak pada sejauh mana kemampuan budaya yang bersangkutan secara eksis mengemas, mewacanakan, menawarkan diri, atau mengkomunikasikan kepada kelompok masyarakat lain, dan sejauh mana masyarakat lain itu dapat ”terpengaruh” oleh eksistensi dan komunikasi budaya lain tersebut. Dengan demikian, komunikasi merupakan bagian dari kata kunci yang harus ditekankan dalam persoalan dan proses ”kebudayaan harus disadari” tersebut di atas. Komunikasi dalam hal ini tentu saja menyangkut berbagai aktivitas yang terjadi pada saat

terjadinya pertemuan antar-budaya. Namun demikian dalam kesempatan ini yang lebih akan dibicarakan adalah komunikasi dengan bahasa dalam arti verbal dan sastra, baik lisan maupun tulisan.

Menurut Muhyidin (2009: 24), bahasa pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat penuturnya karena selain merupakan fenomena sosial, bahasa juga merupakan fenomena budaya. Sebagai fenomena sosial, bahasa merupakan suatu bentuk perilaku sosial yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Sementara itu, sebagai fenomena budaya, bahasa selain merupakan salah satu unsur budaya, juga merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya. Atas dasar itu, pemahaman terhadap unsur-unsur budaya suatu masyarakat, di samping terhadap berbagai unsur sosial, juga merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari suatu bahasa.

Pada tahun 60-an komite Amerika mengenai bahasa dan budaya mengungkapkan hubungan antara bahasa dan budaya. Hubungan-hubungan tersebut adalah: (1) bahasa adalah bagian dari budaya, (2) bahasa adalah wahana budaya, dan (3) bahasa itu sendiri merupakan subjek bagi sikap dan kepercayaan terkondisi secara kultural (Bishop dalam Tarigan, 1991: 56). Oleh karena bahasa merupakan wahana budaya, maka keberadaan bahasa sebagai wahana pelestarian budaya bahkan sebagai wahana pengembangannya merupakan hal yang vital. Dalam suatu sub judul ”kebudayaan sebagai suatu rencana”, Peursen (1988: 141-143) menggaris bawahi bahwa manusia dapat berkembang, dapat belajar dan dapat mengembangkannya atau dengan kata lain dapat berbudaya, melestarikan kebudayaannya atau bahkan mengembangkan kebudayaannya adalah melalui bahasa. Proses itu menjadi selangkah lebih maju ketaika manusia telah dapat menuliskan bahasanya. Pada saat-saat terakhir ini, bahasa dalam arti luas yakni proses komunikasi telah mencapai taraf yang tinggi, yakni melalui internet dan jaringan-jaringan moderen lainnya. Tentu saja peranan bahasa sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya semakin nyata. Hal ini yang semestinya harus ”disadari” oleh setiap masyarakat pendukung setiap kebudayaan, yang dalam konteks Peursen tersebut dinyatakan ”kebudayaan sebagai suatu recana”. Dengan demikian, strategi kebudayaan tidak lain harus melalui pilar bahasa, dan strategi kebudayaan itu sendiri, pilar utamanya adalah strategi bahasa. Bahasa internasional, kalau boleh, juga dapat dianggap sebagai strategi yang merupakan pilar menuju kebudayaan global.

Dalam tataran kebudayaan daerah, sesungguhnya, semua kebudayaan secara relatif merupakan kebudayaan daerah. Dengan kata lain arus globalisasi tidaklah serta merta terjadi. Kebudayaan-kebudayaan besar, pada mulanya juga hanya didukung oleh kelompok masyarakat tertentu pada daerah atau wilayah tertentu saja. Dengan demikian, tentu juga bukan sekedar utopia yang melayang-layang, bila setiap kebudayaan daerah semestinya berhak mengusung idealisme kebudayaannya dalam rangka kebudayaan yang lebih global di masa mendatang.

4. Sastra Daerah sebagai Pilar Pelestarian dan Pengembanagn Kebudayaan

Para sosiolog sepakat bahwa karya sastra merupakan salah satu sumber informasi mengenai tingkah laku, nilai dan cita-cita yang ada di dalam masyarakat, pada generasi atau era tertentu. Sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang masalah manusia, kemanusiaan, dan semesta (Semi, 1993:1). Sastra sebagai pengungkapan kebudayaan juga merupakan pengungkapan permasalahan manusia, termasuk di dalamnya kritik kemanusiaan yakni kebudayaannya. Dalam hal ini sastra juga berkedudukan sebagai wahana komunikasi budaya, yang hampir sama dengan bahasa secara verbal. Bila bahasa cenderung berupa perlakuan verbal dan cenderung temporal, lebih dari itu sastra merupakan perlakuan dengan cara yang lebih luwes, lebih berseni, dan sering terlepas dari sekat-sekat ruang dan waktu. Sastra dari negeri Inggris dapat dinikmati oleh masyarakat di Brunai ini, namun yang lebih luwes lagi, sastra pada beberapa abad yang lalu, seperti sastra Jawa Kuna, masih dapat dipahami oleh masyarakat modern saat ini. Kitab *Negarakertagama,* misalnya, menyampaikan sekelumit kebudayaan Majapahit kepada masyarakat modern ini.

Pada dasarnya karya sastra yang juga merupakan bahasa komunikasi itu dapat menyampaikan gambaran kebudayaan pada masyarakat tertentu dan pada era tertentu, namun yang lebih dari itu karya sastra juga dapat mempengaruhi masyarakat tertentu dan bahkan merubah kebudayaan tertentu. Karya sastra merupakan hasil idealisme yang pada akhirnya sering kali dapat terwujud, meskipun tidak identik betul. Kitab-kitab suci, bila boleh dimaknai sebagai karya sastra secara luas (termasuk hasil pewahyuan), merupakan idealisme yang harus direalisasikan. Cerita wayang dari masyarakat Hindu, misalnya, tentang Gatutkaca yang dapat terbang, Antasena yang hidup di laut, dan Antareja yang dapat amblas di dalam bumi, hampir semuanya kini terealisasi. Adanya kapal terbang, kapal selam dan kapal pemecah es atau

mungkin juga gerakan bawah tanah, merupakan hasil dari idealisme putera-putera Pandawa tersebut. Ceritera-ceritera dan berbagai peralatan canggih seperti dalam kisah-kisah 007 atau James Bond, barangkali juga dapat saja direalisasikan. Yang perlu disadari adalah dalam kebudayaan apa bahasa sastra itu harus membawa pelestariannya dan kemana arah bahasa dan sastra itu harus membawa pengembangannya?

Pertanyaan seperti itu tentu juga telah menjadi pertanyaan yang klise. Semua sastrawan adalah filsof yang berpikir ke arah kemajuan manusia yakni manusia yang lebih manusiawi, atau memanusiakan manusia. Namun demikian, juga tidak dapat diingkari selalu terdapat perbedaan intensitas kemanusian yang diekspresikan. Sastra sebagai pengemban pelestarian dan pengembangan kebudayaan, merupakan bagian dari strategi kebudayaan yang harus dihayati oleh setiap pencipta karya sastra. Dengan demikian setiap kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah tertentu, akan memiliki hak yang sama dalam menawarkan nilai-nilainya kepada penghujung masyarakat global yang akan datang. Secara abstraksi, idealisme kebudayaan yang diharapkan adalah suatu masyarakat dunia yang adil makmur dan yang dalam bahasa daerah Jawa dirumuskan sebagai *gemah ripah loh jinawi tata tentren karta raharja* (adil makmur yang tertata yang tenteram dan yang menyelamatkan manusia).

5. Penutup

Semenjak manusia ada hingga manusia mampu mengembangkan kebudayaannya mencapai kebudayaan dewasa ini, kehidupannya selalu didampingi oleh bahasa dan sastranya. Bahkan bahasa dan sastra sangat menentukan peran dan eksistensi suatu kebudayaan sehingga suatu kebudayaan itu akan lestari dan berkembang atau pun tidak. Jelaslah bahwa bahasa dan sastra merupakan pilar, bahkan pilar utama pelestarian dan pengembangan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, Hazim. 1991. *Nilai-nilai Etis dalam Wayang*. Jakarta: Sinar Harapan

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudaanyaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

_____. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Mulyono, Sri. 1978. *Wayang, Asal-usul, Filsafat dan Masa Depannya*. Jakarta: Gunung Agung

Muhyidin, Asep, 2009. ”Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Pemelajaran Sastra di Sekolah” , Makalah Disampaikan dalam Seminar Internasional HISKI di Jakarta 2009.

Peursen, van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

Poerbatjaraka. 1952. *Kapustakan Djawi*. Djakarta: Djambatan

Semi, M. Atar. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.

Spradley, James P. 1997. *The Etnographic Interview* (terjemahan). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suriasumantri, Jujun. 1996. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Zoetmulder. 1983. *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan